



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS GADJAH MADA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SURYONO**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **854428**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **3.780.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.520.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 780.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 559 m2/70 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **626.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI NINJA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. MOBIL, HONDA CIVIC SEDAN Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. MOTOR, HONDA SPM.SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
6. MOBIL, NISSAN MAGNITE PREMIUM 1.0 / MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **10.000.000**

**D. SURAT BERHARGA** Rp. **----**

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **56.214.195**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ---  
Rp. 4.472.214.195

III. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. ---  
Rp. 4.472.214.195

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.